



**PAPARAN
MENTERI DALAM NEGERI RI
PADA
KOORDINASI TEKNIS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
REGIONAL II TAHUN 2020**



Oleh:
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph. D

Bandung, 10 Maret 2020





Dr. HADI PRABOWO,
MM
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM
NEGERI

RIWAYAT JABATAN LAIN

- KOMISARIS PT. JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA) PROVINSI DKI JAKARTA (2019-SEKARANG)
- KOMISARIS UTAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (2009-2013)
- KOMISARIS UTAMA PT. SARANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH (2007-2011)
- KOMISARIS PT. SARANA PATRA HULU CEPU (2006-2009)
- KOMISARIS II PT. SARANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH (2006-2007)
- DIREKTUR PT. SARANA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH (2005-2006)

TANDA

- SATYA LENCANA KARYA SATYA XXV TAHUN (2015)
- SATYA LENCANA PEMBANGUNAN BIDANG KOPERASI (2012)
- SATYA LENCANA KARYA SATYA XX TAHUN (2006)
- SATYA LENCANA KARYA SATYA X TAHUN (2003)

RIWAYAT JABATAN

- Plt. REKTOR IPDN (19 OKTOBER 2019-SEKARANG)
- Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN (2018)
- SEKRETARIS JENDERAL KEMENDAGRI (27 FEBRUARI 2018-SEKARANG)
- Plt. SEKRETARIS JENDERAL KEMENDAGRI (2017)
- SEKRETARIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (2017-2018)
- Plt. SEKRETARIS BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN (2016)
- Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (2015-2016)
- DEPUTI I BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (2014-2016)
- STAF AHLI MENTERI BIDANG SDM & KEPENDUDUKAN KEMENDAGRI (2014)
- SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (2008-2013)
- ASISTEN ADMINISTRASI SETPROV JAWA TENGAH (2005-2008)
- KEPALA BIRO KEUANGAN SETPROV JAWA TENGAH (2000-2005)
- KEPALA BAGIAN ANGGARAN BIRO KEUANGAN SETPROV JATENG (1996-2000)
- KASUBBAG PERKOTAAN BIRO BANGDA SETPROV JATENG (1994-1996)
- KASUBBAG SOSIAL BUDAYA BIRO BANGDA SETPROV JATENG (1988-1994)



*“Strategic Planning is
Worthless, Unless There is
First a Strategic Vision”*

-John Naisbitt-



PENDAHULUAN

“Hampir semua persoalan menyangkut daerah apalagi otonomi daerah.

Betul, bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemimpin daerah untuk membuat program kerja masing-masing. Namun sebagai suatu sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan maka pemerintah daerah juga harus mengakomodir rencana pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden”



“Dalam program kerja dan anggaran yang saat ini sedang berlangsung di daerah, diharapkan visi misi presiden kemudian diterjemahkan oleh para menteri dan dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Sehingga dapat masuk dalam program kerja daerah”

Menteri Dalam Negeri,
Prof. HM. Tito Karnavian Ph.D

Rakornas Indonesia Maju dan Forkopimda Tahun 2019
-13 November 2019-





5 Arahan Utama Presiden

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan *omnibus law*. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Kementerian Dalam Negeri berperan mendorong pemerintah daerah mendukung fokus kerja pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi



***URGENSI RAKORTEKRENBANG DALAM
SINKRONISASI DAN HARMONISASI
PEMBANGUNAN DAERAH***



DASAR PELAKSANAAN RAKORTEKRENBANG

Ps. 258
UU
23/2014

- **Pembangunan Daerah** merupakan **perwujudan** dari **pelaksanaan Urusan Pemerintahan** yang **telah diserahkan** ke **Daerah** sebagai **bagian integral** dari **pembangunan nasional**.
- **K/L** melakukan **sinkronisasi** dan **harmonisasi** dengan **Daerah** untuk **mencapai target pembangunan nasional**.

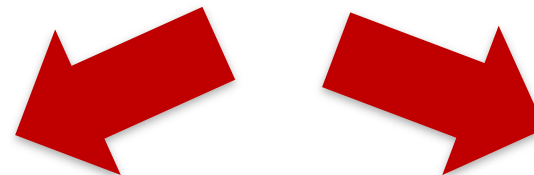
Pencapaian target nasional tidak hanya dari Pem. Pusat, tetapi juga oleh Pemda sesuai dgn kewenangannya



K/L melakukan koordinasi teknis yang dikoordinasikan oleh Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas



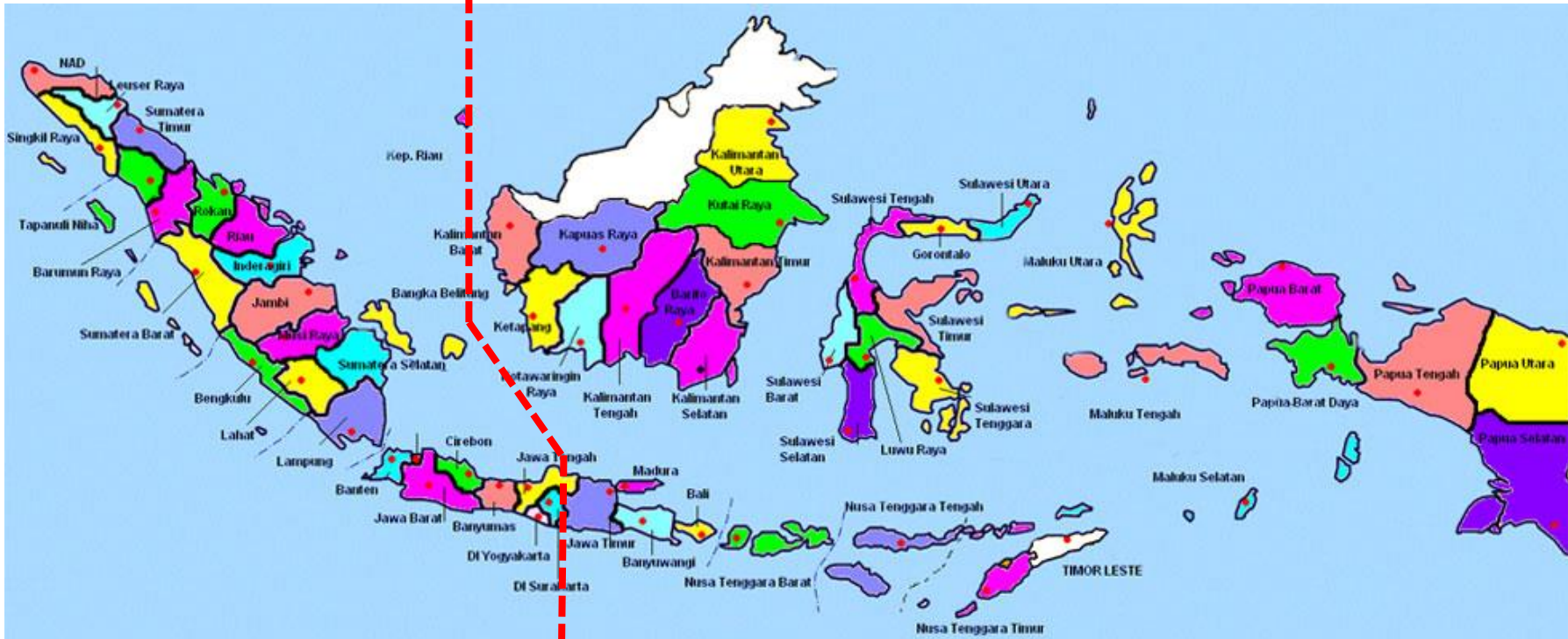
Kemendagri Pembinaan dan Pengawasan umum



K/L melakukan pembinaan dan pengawasan teknis



RAKORTEKRENBANG REGIONAL 2



Pemerintah Daerah :

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Kepulauan Riau
6. Jambi
7. Bengkulu
8. Sumatera Selatan
9. Bangka Belitung
10. Lampung
11. DKI Jakarta
12. Jawa Barat
13. Banten
14. Jawa Tengah
15. DI Yogyakarta
16. Bali

Pemerintah Pusat :

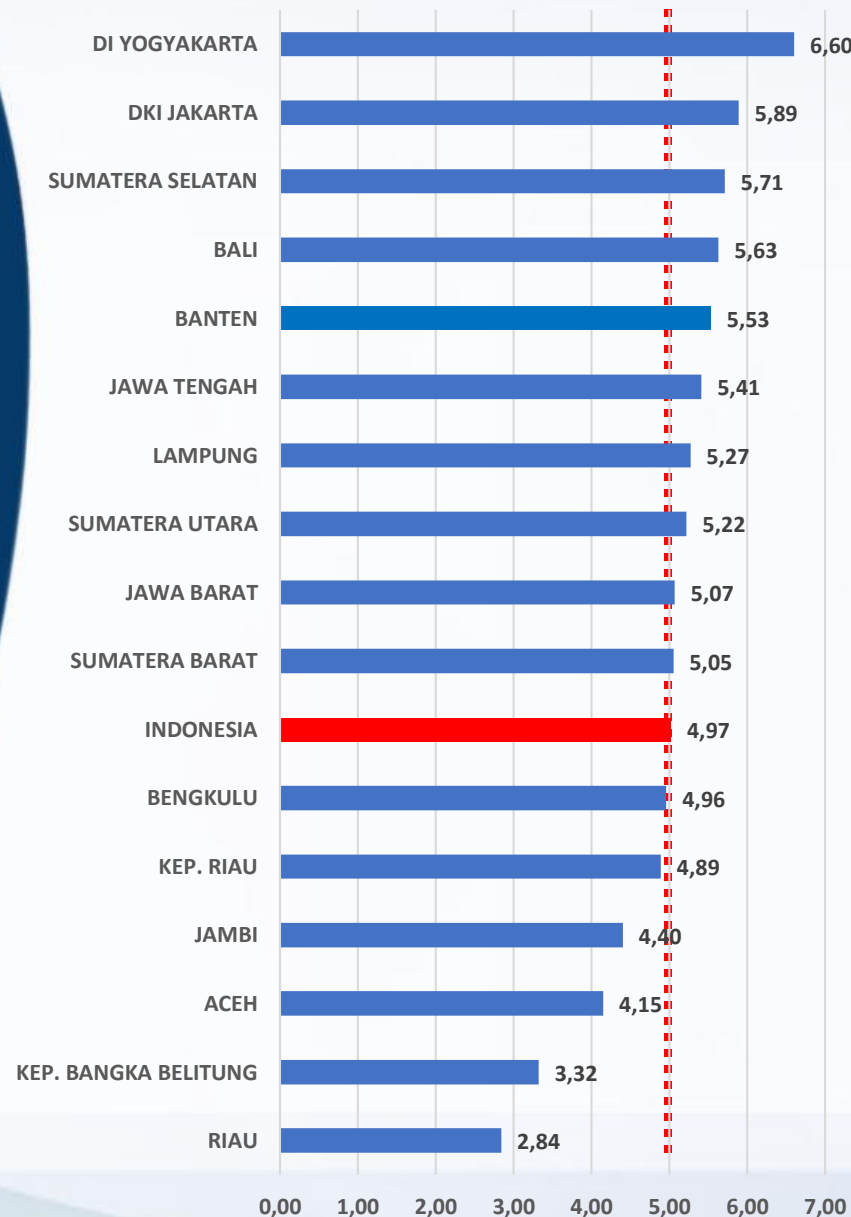
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian/Lembaga

Pembahasan dilakukan dalam Desk Urusan dan Desk Kewilayahan



***KONDISI CAPAIAN PEMBANGUNAN INDIKATOR
MAKRO DI REGIONAL BARAT TAHUN 2019***

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL 2 TAHUN 2019



*3 Provinsi dengan Laju Pertumbuhan
Ekonomi **tertinggi** :*

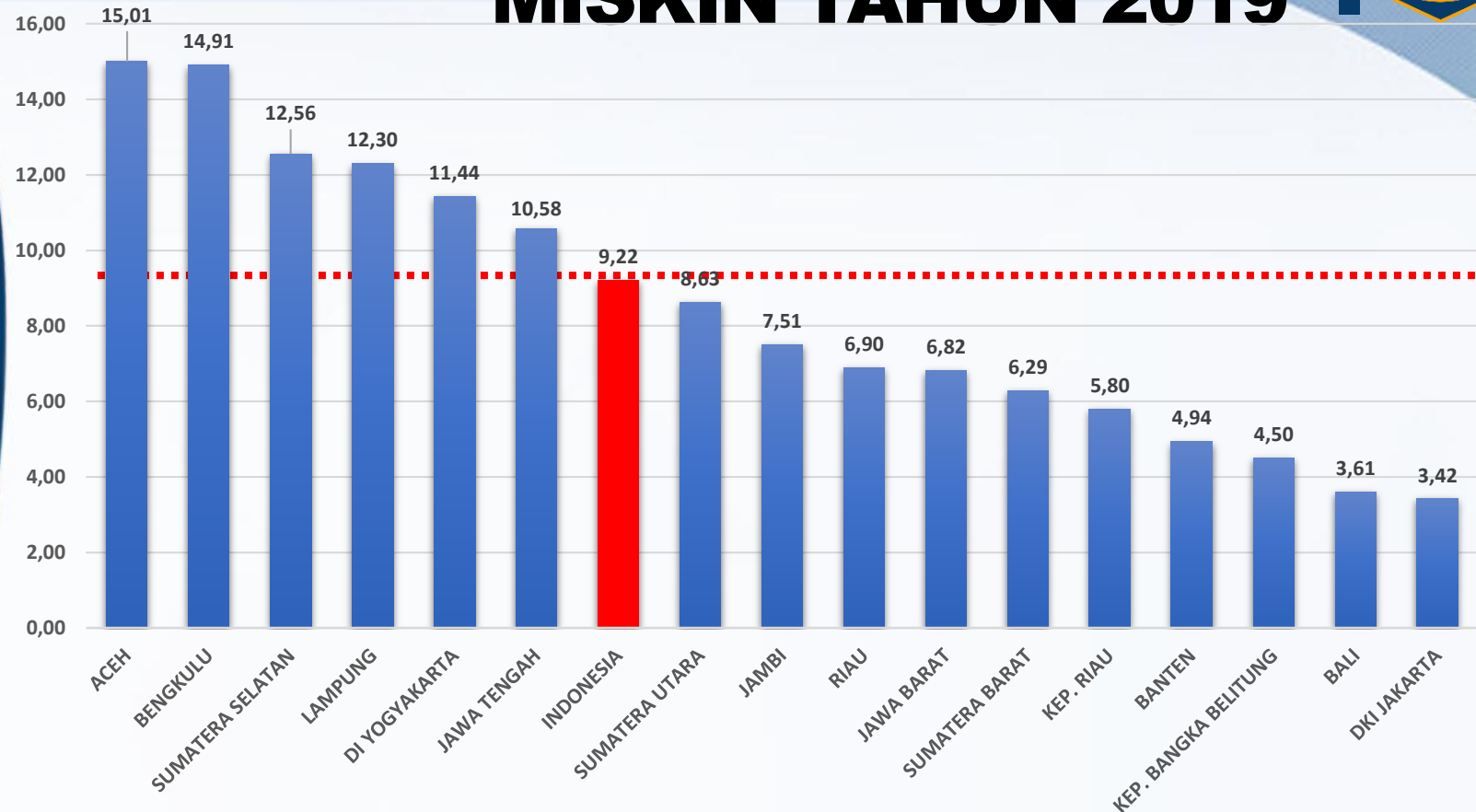
1. DI Yogyakarta

2. DKI Jakarta

3. Sumatera Selatan

*Untuk Provinsi **Riau** dan **Bangka
Belitung** berada pada 2 posisi
terendah di Regional 2 dan
**membutuhkan langkah-langkah
strategis** untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.*

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2019



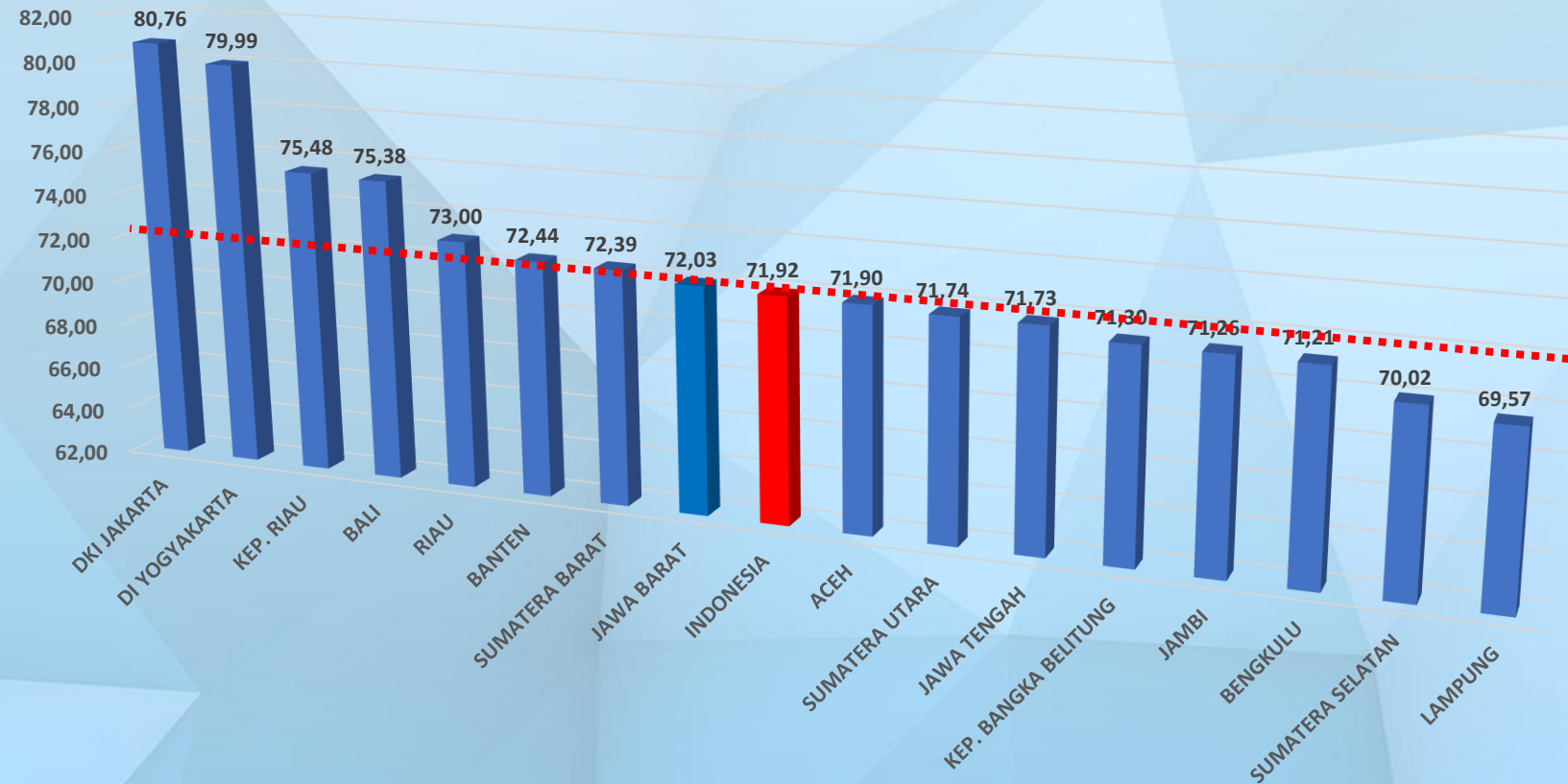
Tujuan pembangunan untuk meningkatkan ***kesejahteraan masyarakat*** yang salah satunya ***dinilai*** dari ***persentase penduduk miskin***. Untuk ***provinsi*** yang masih berada ***di bawah rata-rata nasional***, diperlukan ***sinergitas nyata*** antar sektor dalam ***penanganan kemiskinan***.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER FEB 2019



*TPT merupakan unsur yang harus diperhatikan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. Untuk **Bali** pada prinsipnya sudah sangat baik karena sudah di bawah 2%. Namun, **Banten dan Jawa Barat** perlu perhatian khusus karena masih di atas 7%.*

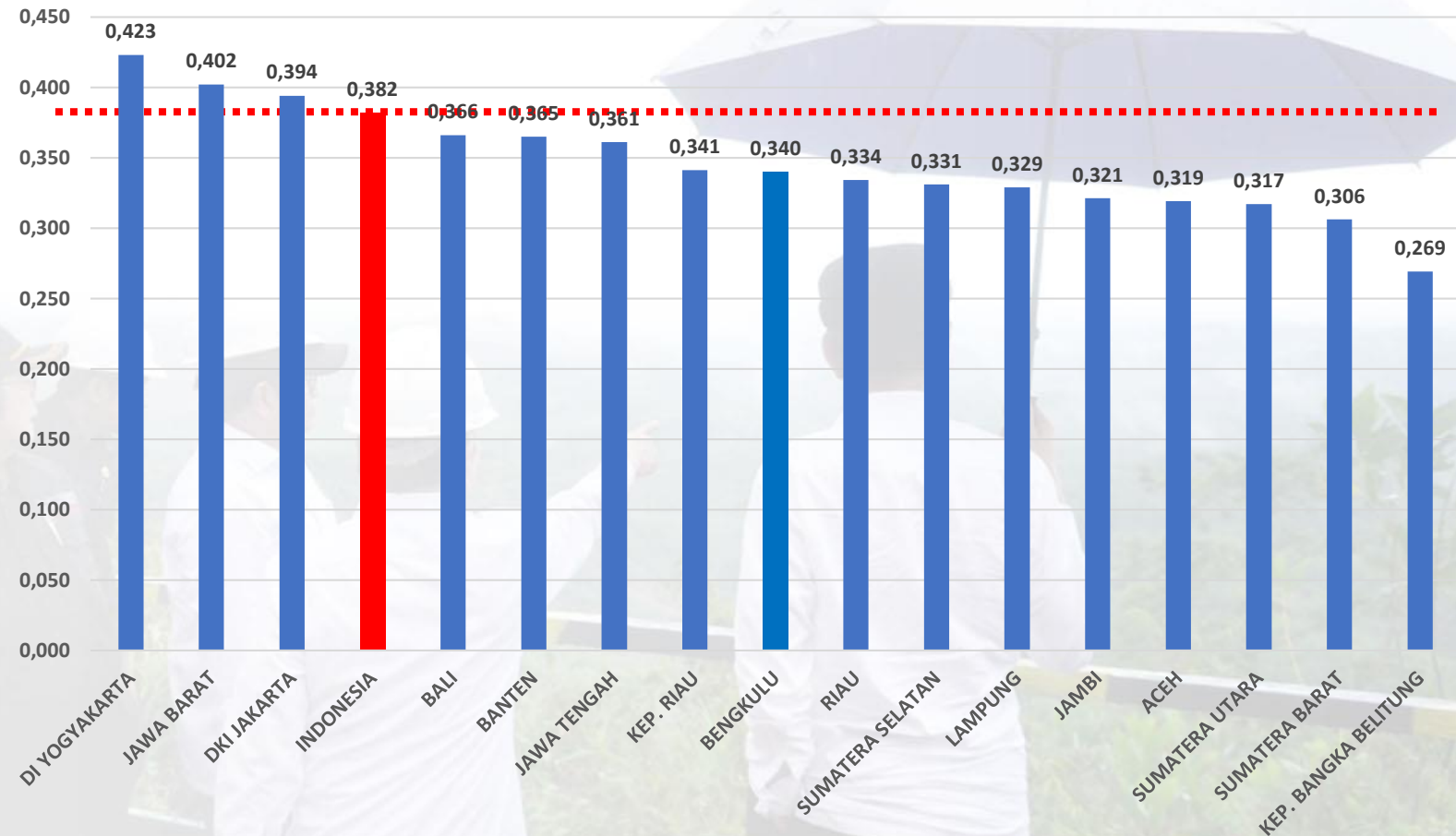
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2019



Untuk Provinsi **DKI Jakarta** patut **diapresiasi** karena memiliki angka **IPM tertinggi** yaitu **80,76%**, sedangkan Provinsi **Lampung** masih **perlu peningkatan khususnya** di sektor **pendidikan dan kesehatan** karena memiliki **nilai terendah** yaitu **69,57%**.



GINI RASIO TAHUN 2019



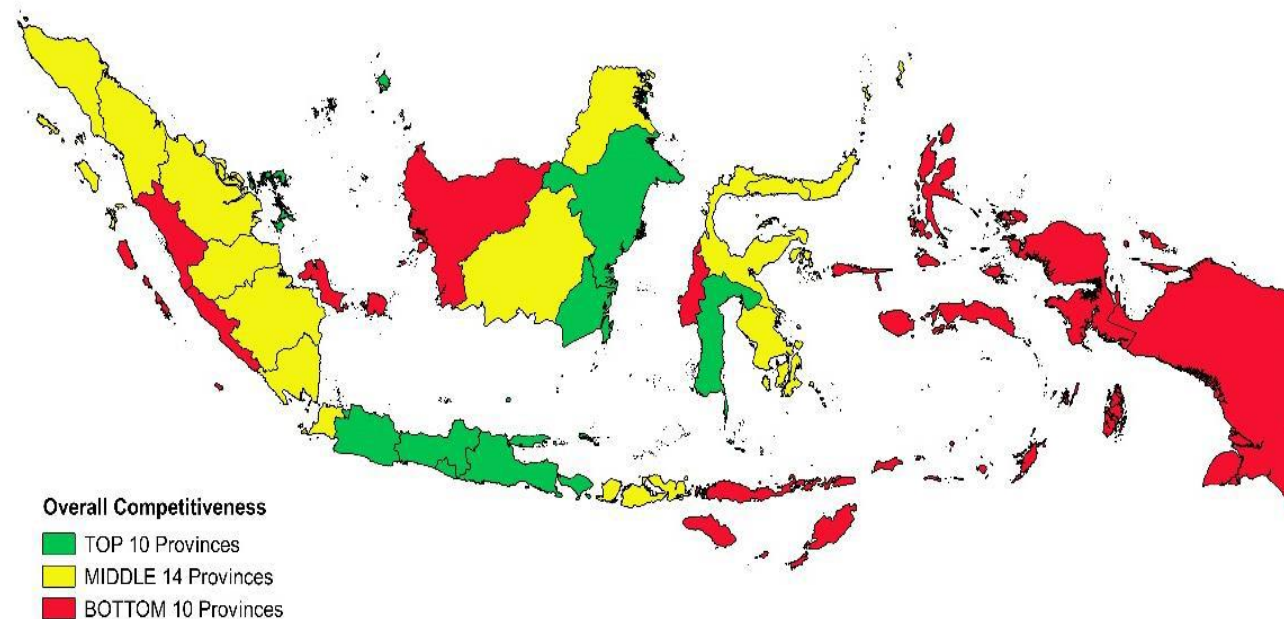
Provinsi Bangka Belitung memiliki gini rasio terendah yaitu **0,269** (ketimpangan rendah), **DI Yogyakarta, Jawa Barat** dan **DKI Jakarta** memiliki **indeks Gini Rasio 3 tertinggi**, namun masih dalam kategori tingkat ketimpangan sedang.



POTENSI FISKAL DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN

Ranking Indeks Daya Saing Seluruh Aspek

NO.	PROVINSI	RANKING 2017	RANKING 2018*	SCORE
1.	DKI Jakarta	1	1	3.149
2.	Jawa Barat	3	3	1,548
3.	Jawa Tengah	5	4	1,358
4.	DIY	9	6	0500
5.	Bali	7	8	0.401
6.	Kepulauan Riau	10	9	0,279
7.	Lampung	14	11	0,140
8.	Banten	6	12	0,128
9.	Riau	16	13	0,056
10.	Sumatera Selatan	24	18	-0,024
11.	Sumatera Utara	20	20	-0,301
12.	Aceh	25	22	-0,350
13.	Jambi	18	24	-0,559
14.	Sumatera Barat	15	25	-0,602
15.	Kep. Bangka Belitung	22	26	-0,736
16.	Bengkulu	27	29	-0,921



Berdasarkan survei **Asian Competitiveness Index (ACI)** Tahun **2018**, kondisi **daya saing** di antara **provinsi-provinsi** di **Indonesia** menurut aspek-aspeknya adalah sbb:

- Stabilitas makro ekonomi:** Tertinggi: DKI Jakarta; Terendah: Bengkulu
- Kelembagaan dan Pemerintahan:** Tertinggi: DKI Jakarta; Terendah: Bengkulu
- SDM, bisnis, dan keuangan:** Tertinggi: DKI Jakarta; Terendah: Aceh
- Kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur:** Tertinggi: DI Yogyakarta; Terendah: Kepulauan Bangka Belitung

INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD) 2019



NO.	PROVINSI	INDEKS KFD 2019	KATEGORI KFD
1.	DKI Jakarta	11,473	Sangat Tinggi
2.	Jawa Barat	3,171	Sangat Tinggi
3.	Jawa Tengah	1,948	Sangat Tinggi
4.	Banten	1,135	Tinggi
5.	Riau	0,956	Tinggi
6.	Sumatera Utara	0,945	Tinggi
7.	Sumatera Selatan	0,794	Sedang
8.	Bali	0,610	Sedang
9.	Lampung	0,590	Sedang
10.	Aceh	0,529	Sedang
11.	Sumatera Barat	0,455	Sedang
12.	Jambi	0,350	Rendah
13.	Bengkulu	0,319	Rendah
14.	Kepulauan Riau	0,386	Rendah
15.	Di Yogyakarta	0,314	Rendah
16.	Bangka Belitung	0,264	Sangat Rendah



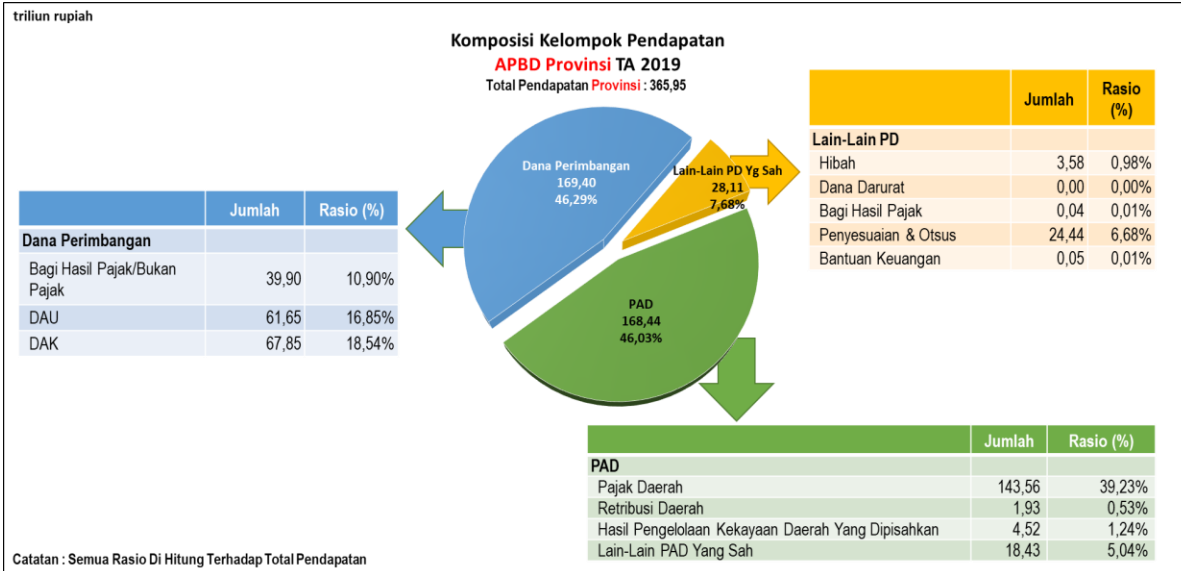
Indeks kapasitas fiskal daerah digunakan untuk mengelompokkan kategori kapasitas fiskal daerah **sebagai dasar pertimbangan** dalam penetapan daerah penerima hibah, penentuan besaran **dana pendamping** oleh pemerintah Daerah, dan/atau **penggunaan lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Semakin rendah kapasitas fiskal daerah, maka semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap alokasi dari pusat

PROPORSI PENDAPATAN DAN BELANJA PROVINSI DALAM APBD TAHUN 2019

Sumber Data:
KepMen Evaluasi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangan Daerah

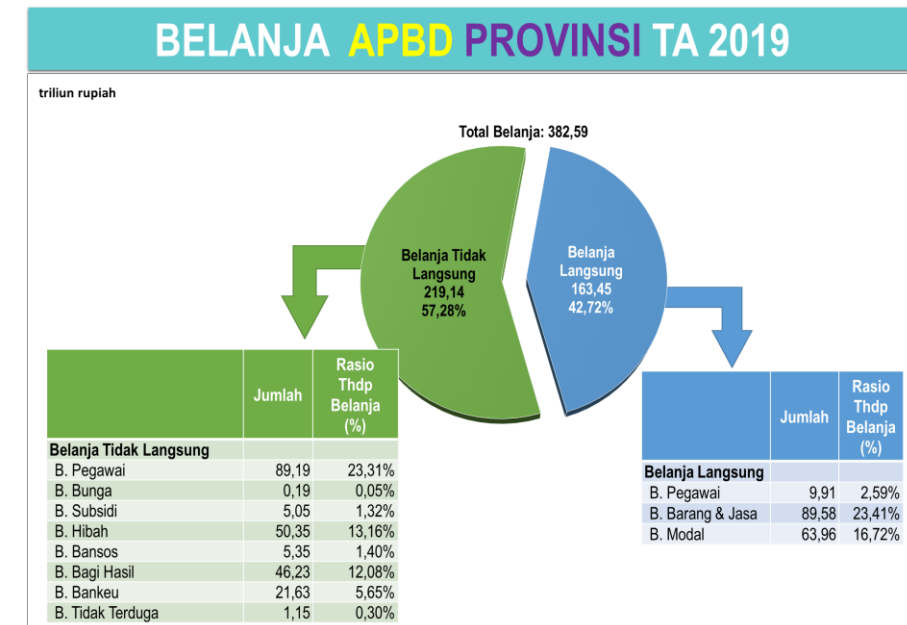


Kontribusi PAD terhadap **pendapatan pemerintah provinsi** pada **Tahun 2019** adalah **46,03%**, yang menunjukkan tingkat kemandirian provinsi di Indonesia **dikategorikan sedang.**



Secara keseluruhan, **belanja tidak langsung** masih **lebih besar** dari **belanja langsung** pada struktur belanja pemerintah **provinsi** Tahun **2019**, sebesar **57,28%**.

Pada **tahun 2021**, **belanja daerah** **dihimbau** agar **diarahkan** untuk nantinya memiliki **manfaat** dan **dampak langsung** kepada **masyarakat.**

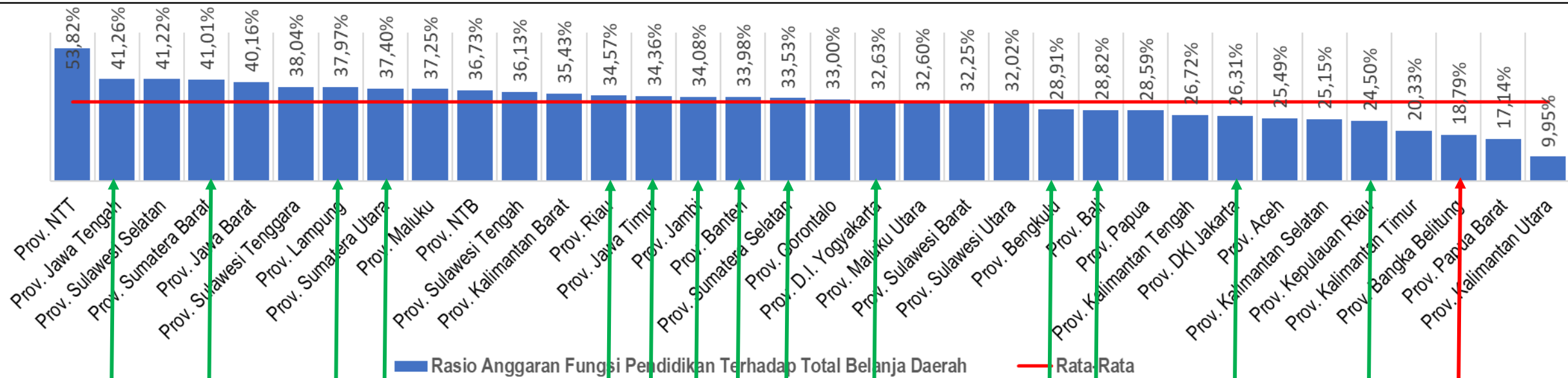


EVALUASI ALOKASI DANA PENDIDIKAN DALAM APBD 2019 REGIONAL 2



“UU 20/2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional (Ps. 49 Ay. 1) : Dana Pendidikan gaji pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD”

rata-rata 32,06%

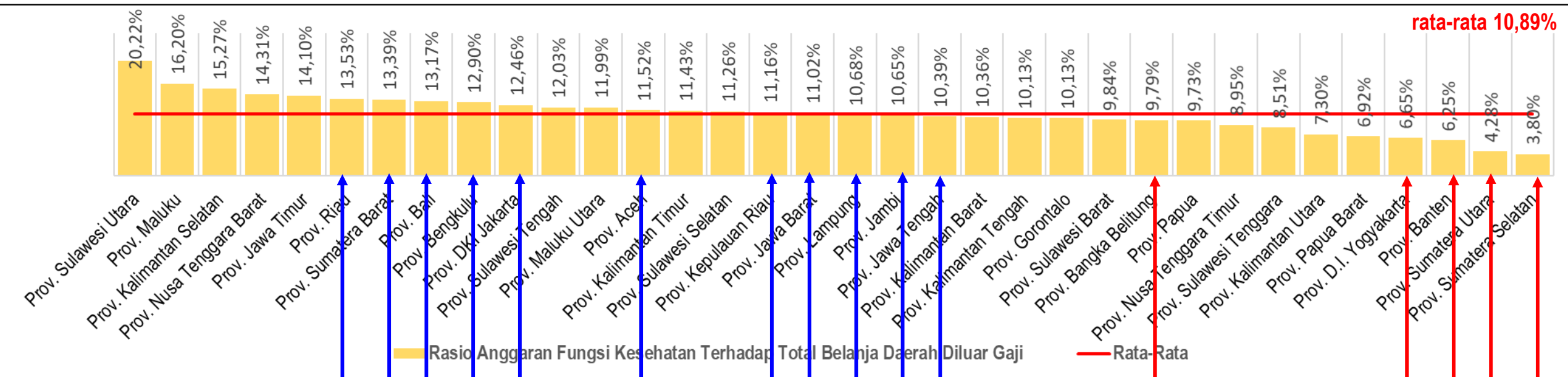


Provinsi Jawa Tengah memiliki **proporsi anggaran Pendidikan tertinggi** dari APBD-nya di **Regional 2**. Namun, untuk **Provinsi Bangka Belitung** masih **di bawah 20%**, hal ini tentunya **perlu ditingkatkan** oleh **Pemerintah Daerah** terkait agar **minimal** mampu dianggarkan **sebesar 20% APBD**.

EVALUASI ALOKASI DANA KESEHATAN DALAM APBD 2019 REGIONAL 2



“UU 36/2009 ttg Kesehatan (Ps. 171 Ay. 2) : Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji.”



Untuk daerah regional 2, masih terdapat **5 (lima) daerah** yang masih **di bawah 10%** yaitu, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Diharapkan untuk **penganggaran di tahun berikutnya** dapat segera **ditingkatkan agar mampu di atas 10%**.

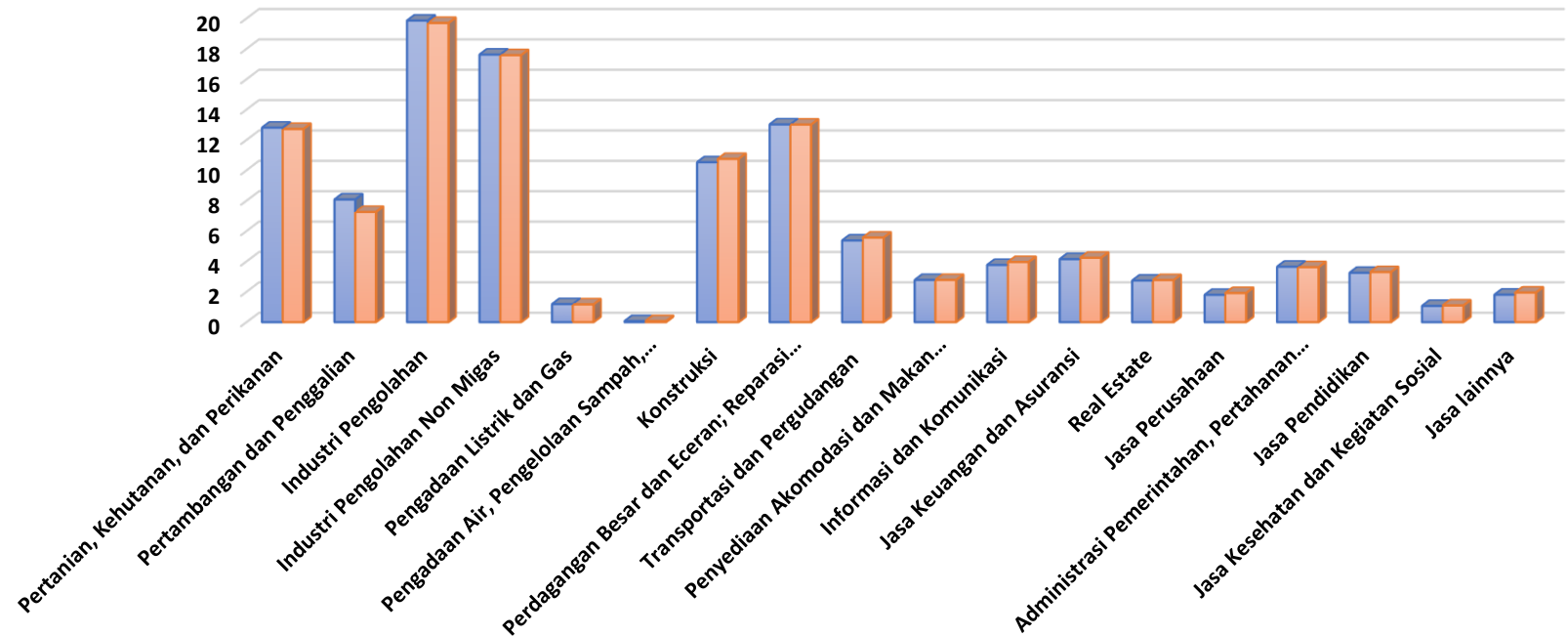


POTENSI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

KONTRIBUSI PDB PER SEKTOR USAHA DI INDONESIA TAHUN 2018-2019

Distribusi PDB Atas Dasar Harga Berlaku per Sektor Usaha (Persen)	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,81	12,72
Pertambangan dan Penggalian	8,08	7,26
Industri Pengolahan	19,86	19,7
Industri Pengolahan Non Migas	17,62	17,58
Pengadaan Listrik dan Gas	1,19	1,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07
Konstruksi	10,53	10,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,02	13,01
Transportasi dan Pergudangan	5,38	5,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,78	2,78
Informasi dan Komunikasi	3,77	3,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,15	4,24
Real Estate	2,74	2,77
Jasa Perusahaan	1,8	1,92
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,65	3,62
Jasa Pendidikan	3,25	3,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,1
Jasa lainnya	1,81	1,95

Persentase PDB per Sektor Usaha Tahun 2018-2019

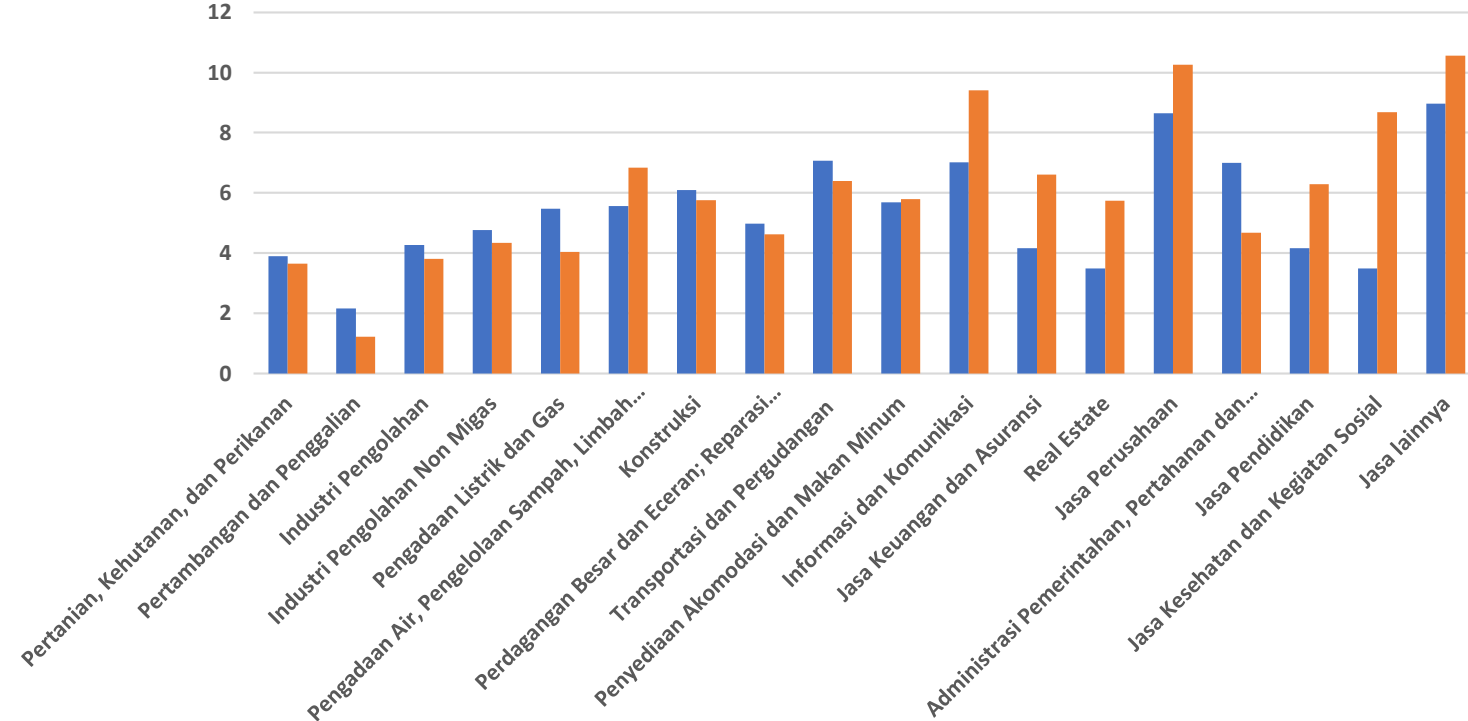


Indonesia memiliki seluruh potensi dalam upaya peningkatan perekonomian, 3 sektor yang memberi kontribusi terbesar:

- 1. Industri Pengolahan**
- 2. Industri Pengolahan Non Migas**
- 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

LAJU PERTUMBUHAN PDB PER SEKTOR USAHA TAHUN 2018-2019

Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB Per Sektor Usaha (persen)	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,89	3,64
Pertambangan dan Penggalian	2,16	1,22
Industri Pengolahan	4,27	3,8
Industri Pengolahan Non Migas	4,77	4,34
Pengadaan Listrik dan Gas	5,47	4,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,56	6,83
Konstruksi	6,09	5,76
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,97	4,62
Transportasi dan Pergudangan	7,06	6,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	5,8
Informasi dan Komunikasi	7,02	9,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,17	6,6
Real Estate	3,48	5,74
Jasa Perusahaan	8,64	10,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7	4,67
Jasa Pendidikan	4,17	6,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,48	8,68
Jasa lainnya	8,97	10,55

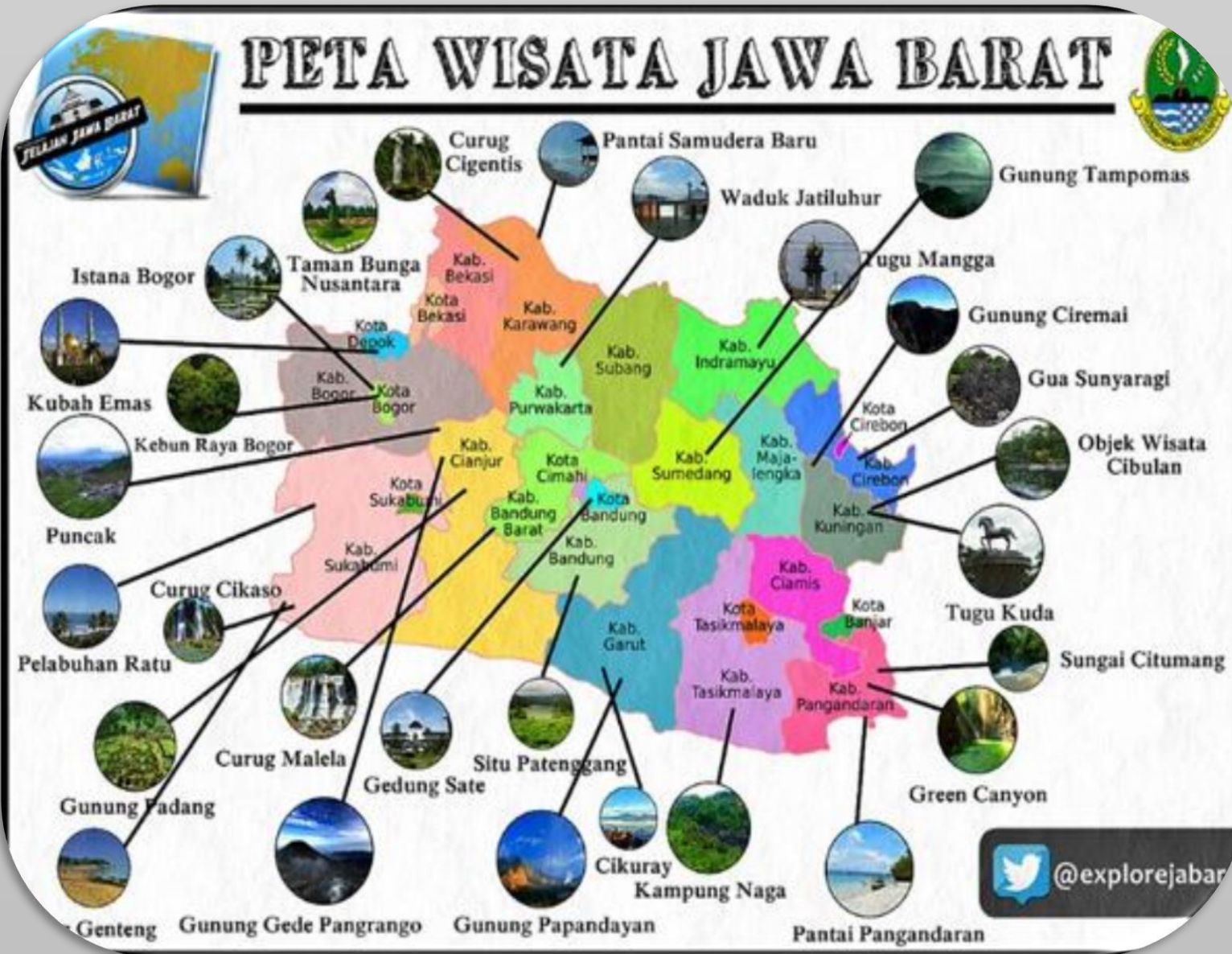


Laju Pertumbuhan Sektor Usaha Tertinggi: Jasa Lainnya (10,55%)
Laju Pertumbuhan Sektor Usaha Terendah: Pertambangan dan Penggalian (1,22%)

Peningkatan pertumbuhan tertinggi: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (5,2%)

Penurunan pertumbuhan terendah: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (-2,33%)

POTENSI PARIWISATA JAWA BARAT



Jenis wisata di Jawa Barat:

- Wisata sejarah
- Wisata budaya
- Wisata alam (gunung)
- Wisata pantai & bahari
- Wisata perbelanjaan
- Wisata edukasi
- Wisata permainan keluarga, dll.

Wisata Kuliner:

- Seblak
- Nasi Timbel
- Karedok
- Mie Kocok
- Surabi
- Peuyeum
- Tahu Sumedang
- Nasi Jamblang
- Tapai ketan
- Dodol garut
- Tahu gejrot
- Dll.

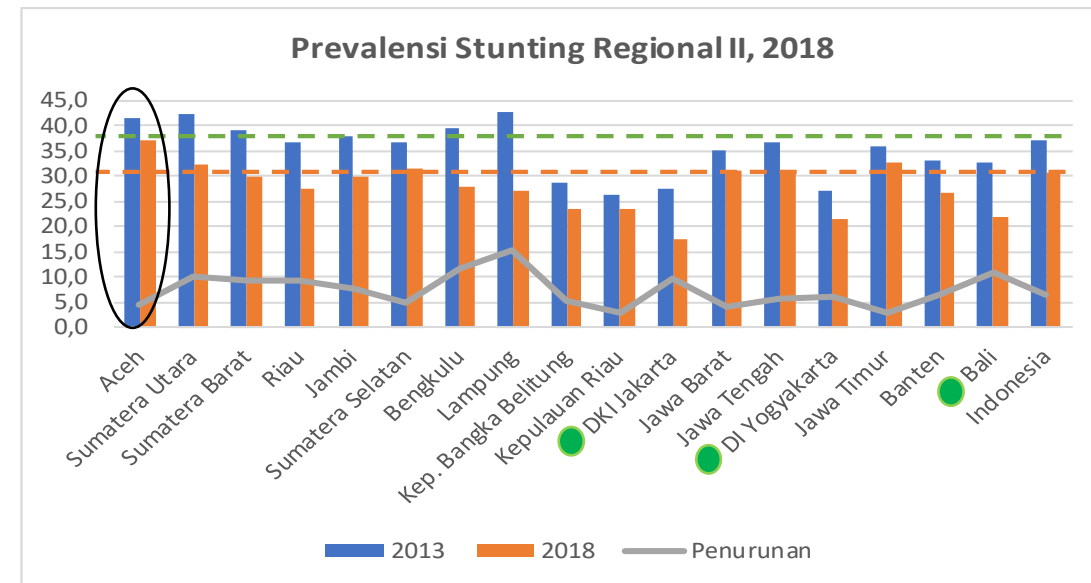
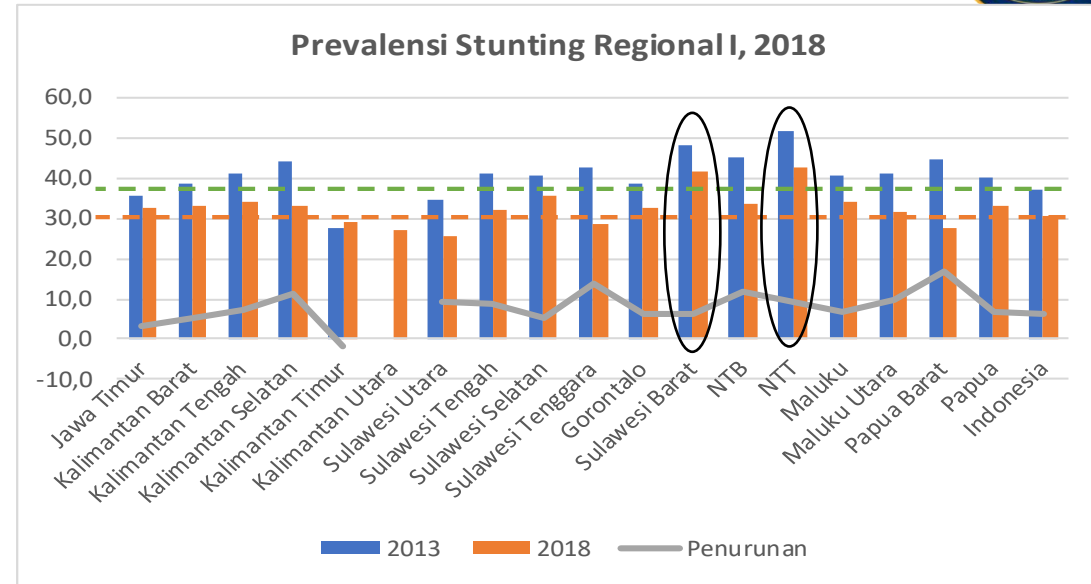




FAKTA STUNTING DI INDONESIA



- ❑ **Stunting** merupakan kondisi **gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak**
→ Hal itu bisa terjadi pada **1.000 hari pertama kehidupan**
- ❑ **Prevalensi Stunting Indonesia 2018 = 30,8 % (1 dari 3 bayi Baduta atau 9 juta anak menderita stunting).**
- ❑ **Regional I** memiliki **Jumlah Provinsi dengan Prevalensi Stunting di atas nasional lebih banyak dibandingkan Regional II.**
- ❑ **Provinsi dengan Prevalensi Stunting Tertinggi: NTT & Sulbar (Regional I), Aceh (Regional II).**
- ❑ **Provinsi dengan Prevalensi Stunting Terendah: DKI Jakarta, DIY, Bali (Regional II)**
- ❑ **Target Nasional Prevalensi Stunting 2024 = 14,0 % (RPJMN 2020-2024) dan stunting telah masuk dalam Major Project**
- ❑ **Kerugian ekonomi akibat stunting: 2-3% dari PDB atau sekitar Rp 300 triliun (PDB Indonesia 2017 sebesar Rp 13.000 triliun).**



Sumber: Riskesdas, 2018



ARAHAN PRESIDEN RI Untuk Percepat Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)

semua jajaran harus

“melakukan terobosan”

dan keluar dari hal yang linier dan bersifat rutinitas.

1. **Pemerintah daerah** agar **segera menetapkan RDTR** sebagai payung hukum penting dan **dasar pelaksanaan percepatan infrastruktur nasional**.
2. **Memberikan kemudahan perizinan** berusaha dengan tetap mematuhi fungsi lahan atau zona dalam Perda RDTR.

sejalan

UU NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

“Pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan”

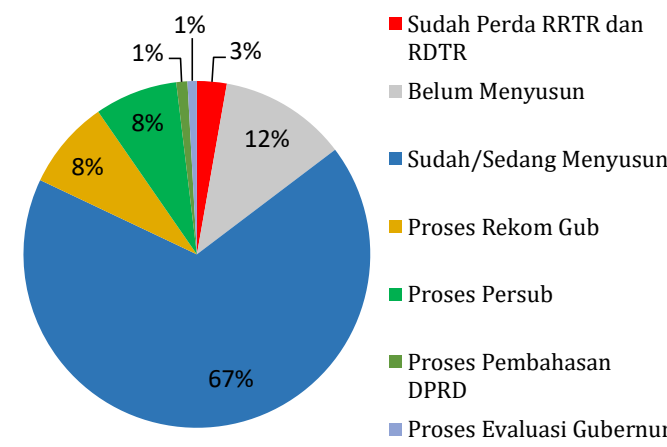
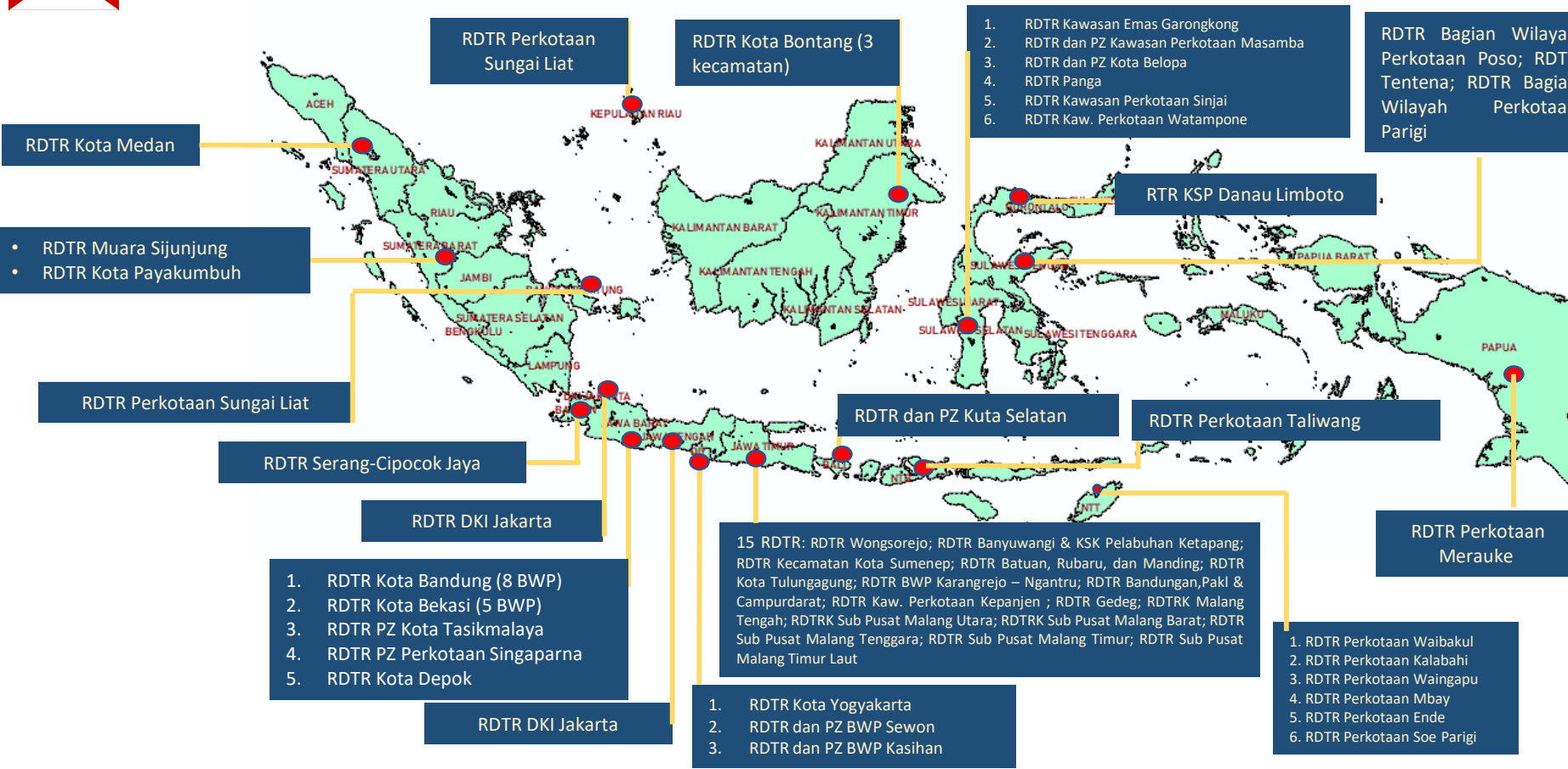




SEBARAN 52 PERDA RDTR SECARA NASIONAL



52 PERDA RDTR SE-INDONESIA



NO	PROGRES RRTR DAN RDTR SELURUH INDONESIA	
1	Sudah RDTR	52
2	Belum Menyusun	219
3	Sudah/Sedang Menyusun	1238
4	Proses Rekom Gub	153
5	Proses Persub	142
6	Proses Pembahasan DPRD	19
7	Proses Evaluasi Gubernur	15
Total RRTR dan RDTR		1838

1. Total RDTR yang harus disusun se-Indonesia sebanyak 1.838 RDTR. Saat ini baru terdapat 52 RDTR (3% dari Total RDTR yang harus disusun).

2. Perlu dialokasikan dalam APBD untuk penetapan Perda RDTR sebagai landasan instrumen pemberian perizinan investasi diseluruh wilayah Indonesia

Sumber: Inventarsir Ditjen Bina Bangda, 2019.



***KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2020***

SASARAN PEMBANGUNAN 2020-2024



7 AGENDA PEMBANGUNAN	
	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
	4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sudah merupakan suatu **kewajiban** nantinya bagi **pemerintah daerah** untuk mampu **mendukung** pencapaian **target RPJMN**. Dukungan pemerintah daerah tentunya nantinya akan **dilakukan melalui pembangunan daerah** yang berbasis **urusan** namun tetap memperhatikan **sinergitas antarsektor**.

IBU KOTA BARU INDONESIA di KALIMANTAN TIMUR

Presiden Joko Widodo
Umumkan Ibu Kota Baru RI
di Istana Kepresidenan
Senin, 26 Agustus 2019



LOKASI

- Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara

ALASAN

- Risiko Bencana Minimal
- Lokasi Strategis di Tengah Indonesia
- Dekat dengan Kota Berkembang: Balikpapan & Samarinda
- Infrastruktur Lengkap
- Tersedia Lahan Negara 158 Ribu Hektare

BIAYA PEMINDAHAN

- Total Rp 466 Triliun
- 19% dari APBN dengan Skema Kerja Sama Pengelolaan Aset
- Sisanya dari Kerja Sama Pemerintah & Badan Usaha
- Investasi Langsung Swasta dengan BUMN

STATUS JAKARTA

- Pusat Bisnis Skala Regional & Global
- Pusat Keuangan & Perdagangan
- Bagian dari Prioritas Pembangunan

Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan diharapkan dapat memberikan manfaat yang luarbiasa, antara lain adalah:

1. Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI
2. Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah
 - Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar 0,1% - 0,2% dan Output Multiplier 2,3;
 - Peningkatan Kesempatan Kerja (Employment Multiplier 2,9);
 - Penurunan Kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Kenaikan Price of capital 0,23% dan Kenaikan Price of Labour 1,37%)
3. Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris
4. Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun
5. Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek.



PERHATIAN TERHADAP PENYELENGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



PILKADA SERENTAK 2020
23 SEPTEMBER

9 PROVINSI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
224 KABUPATEN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
37 KOTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

*SULAWESI SELATAN
KEPULAUAN RIAU
SUMATERA BARAT
BENGKULU
JAMBI
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI UTARA

DAERAH PILKADA SERENTAK 2020
23 SEPTEMBER
9 PROVINSI, 224 KABUPATEN, 37 KOTA

KAMPAYE MELALUI MEDIA MASSA, CETAK DAN ELEKTRONIK DIMULAI 6 SEPTEMBER 2020.
MASA TENANG DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA 20-22 SEPTEMBER 2020
PENGIKUTAN SUARA 23 SEPTEMBER 2020

PROVINSI	KOTA
SUMATERA BARAT	MEDAN
JAMBI	BINJAI
BENGKULU	SIBOLGA
KEPULAUAN RIAU	TANJUNG BALAI
KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG SITOLI
KALIMANTAN SELATAN	PEMATANGSIANTAR
KALIMANTAN UTARA	SOLOK
SULAWESI UTARA	BUKITTINGGI
SULAWESI TENGAH	DUMAI
	SUNGAI PENUH
	METRO
	BANDAR LAMPUNG
	BATAM
	DEPOK
	PEKALONGAN
	SEMARANG
	MAGELANG
	SURAKARTA
	BLITAR
	SURABAYA
	PASURUAN
	CILEGON
	TANGERANG SELATAN
	DENPASAR
	MATARAM
	BANJARBARU
	BANJARMASIN
	SAMARINDA
	BALIKPAPAN
	BONTANG
	BITUNG
	MANADO
	TOMOHOH
	PALU
	MAKASSAR (PILKADA ULANG TAHUN 2018)
	TERNATE
	TIDORE KEPULAUAN

KABUPATEN

TAPANULI SELATAN SERDANG BEDAGAI TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU PAKPAK BHARAT HUMBANG HASUNDUTAN ASAHAN MANDAILING NATAL SAMOSIR KARO NIAS	NIAS SELATAN SIMALUNGUN LABUHANBATU SELATAN LABUHANBATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SOLOK AGAM PASAMAN LIMA PULUH KOTA DHARMASTRAYA SOLOK SELATAN	PADANG PARIAMAN SIJUNJUNG TAMAH DATAR PESISIR SELATAN INDRAGIRI HULU BENGKALIS KIJATAN SINGINGI SIAK ROKAN HILIR ROKAN HULU PELALAWAN KEPULAUAN MERANTI	TANJUNG JABUNG BARAT BATANGHARI BUNGO TANJUNG JABUNG TIMUR OGAN KOMERING HULU OKU SELATAN OGAN ILIR OKU TIMUR MUSI RAWAS PENULIS ABAB LEMATANG ILIR MUSIRAWAS UTARA	SELUMA KAUR REJANG LEBONG KEPAHANG LEBONG MUKOMUKO BENGKULU SELATAN BENGKULU UTARA LAMPUNG SELATAN WAY KANAN LAMPUNG TIMUR LAMPUNG TENGAH	PESAWARAN PESISIR BARAT BANGKA TENGAH BELITUNG TIMUR BANGKA BARAT BANGKA SELATAN LINGGA BINTAN KARIMUN NATUNA KEPULAUAN ANAMBAS SUKABUMI	KAB. BANDUNG INDRAMAYU CIANJUR TASIKMALAYA KARAWANG PANGANDARAN KAB. PEKALONGAN KAB. SEMARANG KEBUMEN REMBANG PURBALINGGA BLORA	KENDAL SUKOHARJO WONGSOREJO WONGGIRI PURWOREJO SRAGEN KLATEN PEMALANG GROBOGAN DEMAK SLEMAN GUNUNG KIDULMOJOKERTO	BANTUL NGAWI JEMBER LAMONGAN PONOROGO KAB. BLITAR SITUBONDO KEDIRI SUMENEP GRESIK KAB. MALANG KIDULMOJOKERTO	PACITAN TRENGGALEK SIDOARJO TUBAN BANYUWANGI KAB. SERANG KAB. PANDEGLANG KARANG ASEM BADUNG TABANAN BANGLI JEMBRANA
---	--	--	--	--	---	--	--	---	--

BIMA
LOMBOK TENGAH
DOMPU
SUMBAWA BARAT
SUMBAWA
LOMBOK UTARA
SUMBA BARAT
MANGGARAI BARAT
SUMBA TIMUR
MANGGARAI
NGADA
BELU

TIMOR TENGAH UTARA
SABU RAJUA
MALAKA
KAPUAS HULU
KETAPANG
SEKADAU
BENGKAYANG
MELAWI
SINTANG
SAMBAS
KOTAWARINGIH TIMUR
BANJAR

TANAH BUMBU
KAB. KOTABARU
BALANGAN
HULU SUNGAI TENGAH
KUTAI KARTANEGARA
PASER
BERAU
KUTAI TIMUR
KUTAI BARAT
MAHAKAM ULU
BULUNGAN
NUNUKAN

MALIHALI
TANA TIDUNG
MINAHASA UTARA
MINAHASA SELATAN
BOLMONG TIMUR
BOLMONG SELATAN
POSO
TOLI-TOLI
TOLJO LINA-LINA
BANGGAI
SIGI
BANGGAI LAUT

MOROWALI UTARA
PANGKAJENE KEPULAUAN
BARRU
GOWA
MARDI
SOPPENG
LUVU TIMUR
LUVU UTARA
BULUKUMBA
TANA TORAJA
KEPULAUAN SELAYAR
TORAJA UTARA

TORAJA UTARA
KONawe SELATAN
MUNA
WAKATOBİ
BUTON UTARA
KONawe UTARA
KONawe KEPULAUAN
KOLAKA TIMUR
BONE BOLANGO
GORONTALO
POHUWATO
MAMUJU

MAJENE
MAMUJU UTARA
MAMUJU TENGAH
SERAM BAGIAN TIMUR
KEPULAUAN ARU
MALUKU BARAT DAYA
BURU SELATAN
HALMAHERA UTARA
HALMAHERA SELATAN
HALMAHERA TIMUR
HALMAHERA BARAT
KEPULAUAN SULA

PULAU TALIABU
BOVEN DIGDEL
MERAUKE
PEGUNJUNGAN BINTANG
ASMAT
NABIRE
WARFEN
YAHUKIMO
KEEROM
SUPRI
MEMBRAMO RAYA
YALIMO

HANDKWARI
FAKFAK
SORONG SELATAN
RAJA AMPAT
KAMANA
TELUK BINTUNI
TELUK WONDAMA
PEGUNJUNGAN ARAFAK
MANOKWARI SELATAN

MEMBANGUN PERSPEKTIF PERDAMAIAN MENGHADAPI PILKADA 2020



Daftar Pemilih



Motif Politik Uang



Provokasi



Isu-isu Hoax Dan SARA



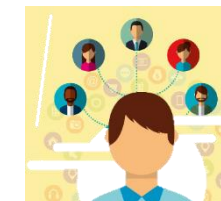
Kesadaran Demokrasi



Langkah Preventif



Kampanye Hitam



Politik Identitas



Cara Kontestan Memenangkan Kursi PILKADA



ARAH KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2020

Untuk lebih **mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa** yang semakin **fokus** pada upaya untuk **mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antardesa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, maka arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2020** ditujukan untuk:

- 1. Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, dengan tetap:**
 - memperhatikan pemerataan dan keadilan;
 - memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta kemiskinan; dan
 - memperhatikan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa;
- 2. Meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa;**
- 3. Memperbaiki pengelolaan Dana Desa** melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan;
- 4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping;**
- 5. Mengoptimalkan peran pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota** dalam pengelolaan Dana Desa;
- 6. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa** melalui penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran.



PENUTUP



Tindak Lanjut Rakortekrenbang

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah



Target Pembangunan Nasional

Fokus pada kontribusi tiap-tiap daerah untuk pencapaian target pembangunan nasional dalam rangka mendukung kinerja Presiden.

Kualitas Hasil (Outcome)

Fokus pada kualitas hasil (outcome) pembangunan daerah melalui sinkronisasi pembangunan, serta penguatan dalam pengendalian dan evaluasinya.

Konsistensi

Konsisten mengawal hasil rakortekrenbang dalam musrenbang provinsi dan nasional, serta dalam dokumen perencanaan dan penganggarnya (RKPD dan APBD)

Fungsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Mengotimalkan pemanfaatan SIPD dalam upaya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah yang saling terhubung dengan sistem informasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada.

Kolaborasi dan Inovasi

Kembangkan kolaborasi dan inovasi, serta keterlibatan masyarakat dan stakeholders lainnya



Arahan Penyusunan RKPD 2021

- **Memperhatikan dan melakukan sinkronisasi** serta **berkontribusi** terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang **RPJMN**, Rancangan RKP 2021 dan **Perda RPJMD yang berlaku**.
- **Mengoptimalkan pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah** yang akan dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2020 yang bertujuan **untuk menyelaraskan program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah** dalam rangka mencapai target pembangunan Nasional.
- **Penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- **Penyusunan RKPD menggunakan SIPD yang saling terhubung dengan sistem informasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah** dengan memperhatikan program serta kegiatan untuk **pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan masing-masing** tingkatan pemerintahan daerah.



TERIMAKASIH³¹